

LAPORAN NOTULA

Diskusi Kelompok Terarah OGWeek “Akuntabilitas Sosial Dalam Musyawarah Desa”

Kamis, 19 Mei 2022 — Pukul 10.00 – 12.00

PENDAHULUAN

Akuntabilitas sosial adalah sebuah “kontrak sosial” antara pemerintah dan masyarakat sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan prinsip akuntabilitas dari praktek pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam akuntabilitas sosial sangat diperlukan dan signifikan. Akuntabilitas sosial di perdesaan memiliki dampak yang sangat tinggi dalam pembangunan desa. Melihat instrumen akuntabilitas sosial yang telah dikembangkan, perlu dilakukan diskusi yang mengulas terkait tindak lanjut dan pengembangan dari konsep akuntabilitas sosial, khususnya di tingkat Desa.

TUJUAN

Webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari *Open Government Week* di Indonesia yang bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan kondisi akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa saat ini
2. Melalui diskusi ini, diharapkan mekanisme akuntabilitas sosial bisa berjalan dengan maksimal di desa

PEMBAHASAN

- **Ibu Rom Romlawati** dari Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Saat ini, PEKKA telah meluncurkan beberapa program untuk mendorong perempuan dan masyarakat dari kelompok marjinal lainnya agar lebih terlibat dalam mekanisme akuntabilitas sosial di desa mereka masing-masing.
 - b. Program-program tersebut adalah: Akademi Paradigta dan KLIK PEKKA. Dalam program-program tersebut, perempuan dilatih untuk menyuarakan aspirasi dan usulan mereka dalam forum-forum penting seperti musyawarah desa. Pada awalnya, mereka mendapati beberapa tantangan seperti kesulitan memperoleh undangan untuk forum-forum penting. Tetapi, PEKKA telah berhasil melewati tantangan tersebut dan sekarang, usulan-usulan dari PEKKA telah menjadi data resmi pemerintah.

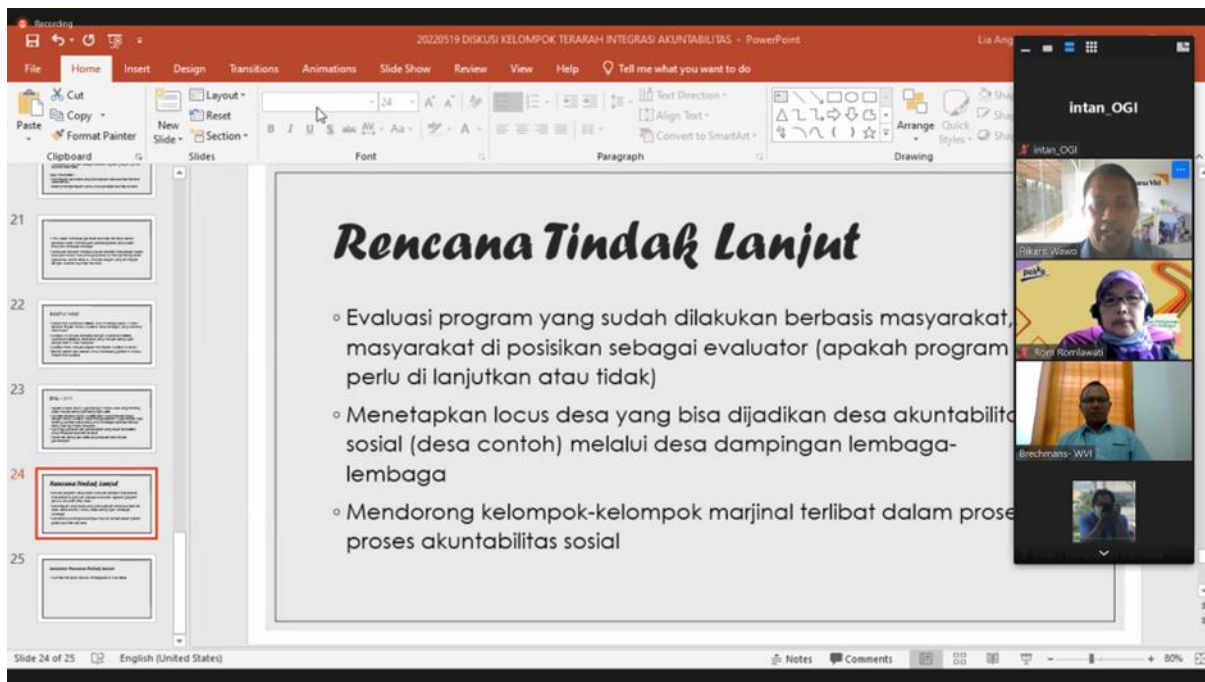
- **Bapak Brechmans** dari Wahana Visi Indonesia menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Wahana Visi Indonesia telah merangkai beberapa program untuk melatih para fasilitator yang ditugaskan untuk melatih para warga untuk mengutarakan aspirasi mereka pada saat musdes (musyawarah desa)
- **Bapak Oktofianus Rahanra** dari Kementrian Dalam Negeri memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Perlu diingat bahwa setiap desa memiliki sasaran enam tahun tersendiri dan sering kali, usulan-usulan dari para penggiat menghambat/memperlambat desa dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah diatur sebelumnya.
- **Bapak Badiul Hadi** dari Sekretariat Nasional FITRA memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum formal seperti musdes harus lebih mengacu secara substansial. Terobosan yang baru dari pemerintah adalah untuk mengambil suara desa dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat secara langsung. Ia mengatakan bahwa partisipasi masyarakat secara substansi lebih penting daripada secara fisik (mekanisme jemput bola)
- **Ibu Margaretta Siregar** dari Wahana Visi Indonesia memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Sedikit disayangkan kondisi saat ini terkait ketidakwajibannya MUSDUS (musyawarah dusun) karena MUSDUS melibatkan lebih banyak masyarakat. Ia mengatakan bahwa ketidakwajibannya musdus merugikan kelompok-kelompok marjinal karena MUSDUS adalah wadah termudah bagi kelompok-kelompok marjinal untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya ke pemerintah.

KESIMPULAN

Saat ini, berbagai NGO seperti PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dan WVI (Wahana Visi Indonesia) telah meluncurkan berbagai program untuk mendorong akuntabilitas sosial di tingkat desa. PEKKA memiliki program pelatihan untuk perempuan dan masyarakat dari kelompok marjinal lainnya untuk lebih berani menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Selain itu, WVI juga mempunyai program untuk

melatih fasilitator desa yang ditugaskan untuk melatih masyarakat-masyarakat desa untuk lebih bisa menyuarakan usulan mereka ke pemerintah.

DOKUMENTASI



The screenshot shows a Microsoft PowerPoint presentation titled "20220519 DISKUSI KELOMPOK TERARAH INTEGRASI AKUNTABILITAS". The slide displayed is titled "Rencana Tindak Lanjut" and contains the following bullet points:

- Evaluasi program yang sudah dilakukan berbasis masyarakat, masyarakat di posisikan sebagai evaluator (apakah program perlu di lanjutkan atau tidak)
- Menetapkan locus desa yang bisa dijadikan desa akuntabilitas sosial (desa contoh) melalui desa dampingan lembaga-lembaga
- Mendorong kelompok-kelompok marjinal terlibat dalam proses proses akuntabilitas sosial

On the right side of the screen, there is a video call window with several participants, including "intan_OGI", "Bikarni Wawo", "Roni Romawati", and "brechnans- WVI". The status bar at the bottom indicates "Slide 24 of 25" and "English (United States)".